



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 12 November 2012

Halaman: 9

Eko Optimistis Selesai 1,5 Bulan

● BLH akan Membuat 400 Buah Sumur Resapan

YOGYA, TRIBUN - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta menyediakan anggaran sebesar Rp 1 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012, untuk membuat 400 titik sumur resapan di seluruh Yogyakarta hingga akhir 2012. Proses pem-

“Kami juga akan segera menurunkan alat berat ke Kali Code untuk pengerukan kembali.”

EKO SURYO MAHARSO
Kepala BLH Yogyakarta

buatan dan penentuan titik sumur resapan tak ditentukan pemerintah melainkan berdasar usulan warga. Kepala BLH Yogyakarta, Eko Suryo Maharso, menjelaskan, pihaknya telah menerima kucuran dana sejumlah Rp 6 miliar dari APBD Perubahan 2012. Total dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pembuatan sumur resapan dan perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) sebesar Rp 1 miliar, penyediaan tana-

man Rp 4 miliar, serta Program Kali Bersih (Prokasi) sekitar Rp 700 juta.

“Kami juga akan segera menurunkan alat berat ke Kali Code untuk pengerukan kembali,” ucap Eko, Minggu (11/11).

Meski waktu efektif pemerintahan periode 2012 tinggal 1,5 bulan, Eko mengaku optimistis mampu merampungkan pekerjaan tersebut sesuai target. Renc-

■ Bersambung ke Hal 12

TERGANTUNG USUL WARGA

- BLH Yogyakarta menyediakan anggaran Rp 1 miliar, untuk membuat 400 titik sumur resapan hingga akhir 2012.
- Proses pembuatan dan penentuan titik sumur resapan berdasar usulan warga.
- BLH juga punya dana Rp 700 juta untuk Prokasi, termasuk Kali Code.
- Kepala BLH, Eko Suryo Maharso, optimistis mampu merampungkan pekerjaan sesuai target.

Eko Optimistis

Sambungan Hal 9

nanya, proses pembuatan dan penentuan titik sumur resapan tidak ditentukan langsung oleh pemerintah, melainkan dibuat berdasarkan usulan warga.

Secara terpisah, menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwanto, Minggu (11/11), mendesak agar BLH segera merampungkan program pembuatan sumur resapan untuk mengantisipasi genangan yang rentan melanda setiap kali musim penghujan datang.

Menurutnya, ada 40 titik rawan genangan di seluruh Kota Yogyakarta, antara lain di Jalan Kusumanegara, Jalan Ipda Tut Harsono,

Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Bantul, Jalan Gambiran, dan kawasan Mandala Krida.

Agar program ini bisa segera dirampungkan, Suwanto meminta BLH tidak menggantungkan pelaksanaan program tersebut pada satu pihak saja. “Targetnya 15 Desember 2012 selesai,” tandas Suwanto.

Meminimalisasi Penyelewengan

Menurutnya, akan lebih baik jika pengerjaannya dilimpahkan kepada pihak ketiga dengan berbasis keluhan sehingga lebih fokus. Masyarakat maupun pihak legislatif juga bisa lebih mudah melakukan pemanta-

uan langsung pengerjaannya untuk meminimalisasi penyelewengan.

Suwanto menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak pembangun yang hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaannya lantaran kurangnya pemantauan oleh masyarakat. Misalnya, pengadaan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang ternyata kurang tulang-tulang besinya.

Sebelumnya, ditetapkan dalam APBD Perubahan bahwa tambahan dana Rp 10,6 miliar dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor Pemda DIY (Rp 10 miliar) dan dana dari pemerintah

pusat bagi hasil pajak dan bukan pajak (Rp 600 juta), ditambah pengalihan anggaran kunjungan kerja (kunker) dewan sebesar Rp 3,1 miliar, akan dialokasikan untuk BLH, Dinas Pendidikan dan DBGAD.

Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Kamis (1/11).

“Anggaran di BLH untuk perbaikan saluran air hujan dan sumur resapan. Di Disdik untuk perawatan gedung sekolah, sedang di DBGAD penambahan sarana dan prasarana,” ujar Kadri. (esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005